

Berita : 4 Desa Terindikasi Korupsi
Entitas / Cakupan : Kabupaten Garut
Sumber / Hal : Galamedia/Hal.9
Edisi : Selasa, 21 November 2017

4 Desa Terindikasi Korupsi

■ Penggunaan ADD 90 Persen Berjalan Baik

GARUT, (GM).-

Dari 421 desa di Kabupaten Garut yang menerima anggaran dana desa (ADD) dari pemerintah pusat, diindikasikan terjadi penyimpangan bersifat koruptif yang diduga dilakukan oleh aparat desa, terhitung relatif kecil. Ada empat desa yang diduga melakukan penyimpangan penggunaan ADD.

Artinya hampir 90 persen pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, yang dananya bersumber dari ADD dan DAD yang diterima masing-masing desa, hampir Rp 1,2 miliar per tahun sudah berjalan dengan baik.

Bupati Garut, Rudy Gunawan, Senin (20/11), menyebutkan hal

tersebut. Hal itu menurutnya, tak terlepas dari aspek pengawasan seluruh pemangku kepentingan, dari mulai unsur Muspika Kabupaten, Provisi, hingga Pemerintah Pusat, yang berkaitan dengan aliran alokasi dana desa yang diaplikasikan untuk pembangunan desa tersebut.

"Bukan hanya aspek pengawasan saja, akan tetapi pemerintah juga turut melakukan pembinaan secara teknis terkait juklak dan juknis penerapan anggaran dana desa, agar tidak terjadi penyimpangan," ujarnya.

Ditangani hukum

Kendati demikian, Rudy juga tidak memungkiri bahwa dari 421 desa tidak semuanya berjalan mu-

lus. Akan tetapi diakuiinya, penyimpangan tersebut selalu ada. Namun menurutnya, hanya beberapa desa saja yang diduga melakukan penyimpangan terhadap dana desa tersebut.

"Mungkin sekitar empat desa, dan semua itu sudah ditangani oleh aparat penegak hukum setempat, karena sudah masuk ranah pidana. Tetapi jika ada persoalan yang bersifat administratif, bisa diselesaikan di tingkat desa dengan jalan musyawarah," paparnya.

Dituturkan, bukan hanya aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan saja yang berhak melakukan pengawasan (dana desa), namun juga masyarakat pun diharapkan turut terlibat dalam

pengawasan dana desa tersebut.

"Jadi bukan hanya tugas aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan saja yang berhak melakukan pengawasan terhadap dana desa, tetapi masyarakat juga harus turut terlibat dalam pengawasannya," katanya.

Terkait dugaan penyimpangan dan dana desa yang diduga dilakukan empat desa tersebut, Rudy tidak menyebutkan desa mana saja yang melakukan hal itu. Begitu juga, Rudy tidak menjelaskan lebih lanjut, apakah penyimpangan tersebut dilakukan oleh oknum aparat desa atau dilakukan secara kolektif. Mengenai berapa nilai penyimpangannya, Rudy pun tidak menjelaskannya lebih lanjut. (ags)**